



## **Tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan praktik kerja lapangan pada pendidikan vokasi**

### ***Collaborative governance in the implementation of industrial work practice in vocational education***

**Muhamad Muammar, Novianita Rulandari\***

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangkaraya, Indonesia

#### **Abstrak**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Program Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan di SMK Negeri 1 Hanau, serta mengidentifikasi proses kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap mutu pembelajaran berbasis kerja.

**Desain/metodologi/pendekatan** – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 20 informan yang terdiri dari kepala sekolah, ketua program keahlian, guru pembimbing, siswa peserta PKL, serta perwakilan industri dari tiga perusahaan mitra. Data juga diperoleh melalui observasi terbatas dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperdalam melalui analisis tematik dengan memastikan keabsahan data melalui triangulasi dan *member checking*.

**Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PKL dipengaruhi oleh kejelasan pembagian peran, intensitas komunikasi, dan komitmen kolaboratif antara sekolah dan industri. Kolaborasi yang terjalin memberikan dampak positif terhadap mutu pembelajaran berbasis kerja, terutama dalam meningkatkan pengalaman dan keterampilan siswa. Faktor pendukung meliputi kesesuaian kompetensi siswa dengan bidang industri serta keberlanjutan kemitraan antara sekolah dan perusahaan. Namun demikian, kendala utama masih berkaitan dengan kesiapan nonteknis sebagian siswa, terutama dalam aspek komunikasi, inisiatif, dan kemampuan adaptasi terhadap budaya kerja industri.

**Keterbatasan penelitian** – Penelitian ini terbatas pada satu sekolah dan tiga perusahaan mitra sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, data yang diperoleh masih didasarkan pada persepsi informan dan belum mencakup pengamatan jangka panjang terhadap pelaksanaan PKL.

**Implikasi** – Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelolaan pendidikan vokasi, khususnya dalam memperkuat tata kelola kemitraan antara sekolah dan industri, meningkatkan pembekalan soft skills siswa sebelum PKL, serta mendorong adanya standarisasi dukungan dari pihak industri agar pelaksanaan pembelajaran berbasis kerja lebih optimal dan berkelanjutan.

**Kebaruan** – Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tata kelola kolaboratif PKL yang tidak hanya menyoroti aspek kemitraan formal, tetapi juga mengintegrasikan desain kelembagaan, proses kolaboratif, dan kapasitas individu siswa dalam konteks pendidikan vokasi bidang agribisnis tanaman perkebunan.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Kolaboratif, Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan Vokasi, *Work-Integrated Learning*, Kemitraan Industri.

#### **Abstract**

**Purpose** – *This study aims to analyze collaborative governance in the implementation of Practical Work Experience (PKL) in the Agribusiness Plantation Program at SMK Negeri 1 Hanau, as well as to identify*

the collaboration process, supporting and inhibiting factors, and its impact on the quality of work-based learning.

**Design/methodology/approach** – This study employs a qualitative case study design. Data were collected through in-depth interviews with 20 informants, including the principal, head of the study program, supervising teachers, students participating in PKL, and representatives from three partner companies. Additional data were obtained through limited observation and document analysis. The data were analyzed interactively through data reduction, data display, and conclusion drawing, and further enriched using thematic analysis. Data validity was ensured through triangulation and member checking.

**Findings** – The findings indicate that the effectiveness of PKL implementation is influenced by clear role distribution, the intensity of communication, and collaborative commitment between the school and industry. The established collaboration contributes positively to the quality of work-based learning, particularly in enhancing students' experience and skills. Supporting factors include the alignment between students' competencies and industry needs, as well as the continuity of partnerships between the school and companies. However, the main challenges concern students' non-technical readiness, particularly in communication, initiative, and adaptation to workplace culture.

**Research limitations** – This study is limited to one school and three partner companies; therefore, the findings cannot be generalized beyond these settings. In addition, the data are largely based on informants' perceptions and do not yet capture the long-term implementation of PKL.

**Implications** – The findings suggest the need to strengthen the governance of vocational education, particularly by improving school–industry partnerships, enhancing students' soft skills prior to participation in PKL, and promoting more standardized support from industry partners to ensure more effective and sustainable work-based learning.

**Originality** – The novelty of this study lies in its analysis of collaborative governance in PKL, not only focusing on formal partnerships but also integrating institutional design, collaborative processes, and students' individual capacities within the context of vocational education in the agribusiness plantation sector.

**Keywords:** Collaborative Governance, Practical Work Experience, Vocational Education, Work-Integrated Learning, Industry Partnership

#### Histori Artikel:

Diterima: 20 Februari 2026, Direvisi: 24 Maret 2026, Disetujui: 26 Maret 2026, Dipublikasikan: 14 April 2026.

#### \*Penulis Korespondensi:

novianitarulandari@gmail.com

#### DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1095>

## PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Di era globalisasi dan transformasi industri, lulusan pendidikan vokasi tidak lagi cukup hanya menguasai keterampilan praktis, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kemampuan beradaptasi, serta pemahaman terhadap budaya kerja profesional. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2019) menegaskan bahwa sistem pendidikan vokasi yang efektif harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan dunia kerja melalui kemitraan yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi antara pembelajaran di sekolah dan pengalaman kerja di industri menjadi faktor penting dalam memastikan kesiapan kerja lulusan.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk memperkuat keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja adalah work-integrated learning (WIL), yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pengalaman kerja nyata di industri. Billett (2018)

menjelaskan bahwa pembelajaran di tempat kerja memberikan pengalaman autentik yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh melalui pembelajaran di kelas. Melalui pengalaman tersebut, siswa tidak hanya mengembangkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk identitas profesional melalui partisipasi aktif dalam praktik kerja. Jackson (2019) menambahkan bahwa pengembangan keterampilan kerja seperti komunikasi, kerja tim, dan kemampuan berpikir kritis sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara siswa, pembimbing industri, dan pihak sekolah.

Dalam konteks pendidikan menengah kejuruan di Indonesia, implementasi konsep WIL diwujudkan melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Program ini berfungsi sebagai jembatan antara pembelajaran teoritis di sekolah dengan praktik kerja di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Melalui PKL, siswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari sekaligus mengembangkan sikap profesional serta kesiapan kerja. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan PKL sangat dipengaruhi oleh kualitas kemitraan antara sekolah dan industri. Suhartanta et al. (2024) menekankan bahwa keberlanjutan program magang sangat bergantung pada adanya evaluasi yang terstruktur serta komunikasi yang konsisten antara sekolah dan industri. Sementara itu, Aprianto (2025) menyoroti pentingnya manajemen kemitraan industri untuk memastikan bahwa kegiatan praktik kerja benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Meskipun pelaksanaan PKL sering dipandang sebagai kegiatan rutin dalam pendidikan vokasi, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam perspektif collaborative governance, kolaborasi dipahami sebagai proses pengambilan keputusan bersama yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor melalui dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama (Ansell & Gash, 2008). Emerson dan Nabatchi (2015) mengembangkan konsep collaborative governance regimes yang menekankan pentingnya desain kelembagaan, dinamika interaksi antaraktor, serta kapasitas bersama dalam mencapai tujuan publik. Dalam konteks PKL, hal ini berarti bahwa sekolah dan industri tidak hanya menjalin kesepakatan formal seperti nota kesepahaman (MoU), tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembimbingan, koordinasi, serta evaluasi pembelajaran siswa di tempat kerja.

Secara konseptual, pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi teknis dan nonteknis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Konsep link and match menjadi landasan penting agar proses pembelajaran di sekolah selaras dengan kebutuhan industri. Dalam perspektif pembelajaran vokasi, Billett (2011) menekankan bahwa pembentukan kompetensi profesional terjadi melalui keterlibatan siswa dalam pengalaman kerja yang autentik dengan bimbingan dari praktisi di tempat kerja. Selain itu, Guile dan Young (2003) memperkenalkan konsep *connective specialization*, yaitu keterhubungan antara pengetahuan konseptual yang dipelajari di sekolah dengan praktik kerja nyata di industri. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam pelaksanaan PKL karena siswa belajar menghubungkan teori dengan praktik kerja secara langsung.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pelaksanaan program praktik kerja atau magang dalam pendidikan vokasi dari berbagai perspektif. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya kemitraan antara sekolah dan industri dalam meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja (Suhartanta et al., 2024; Aprianto, 2025). Penelitian lain menekankan bahwa pengalaman belajar di tempat kerja melalui pendekatan *work-integrated learning* berkontribusi terhadap pengembangan keterampilan teknis maupun keterampilan nonteknis siswa (Billett, 2018; Jackson, 2019). Selain itu, sejumlah penelitian juga membahas evaluasi pelaksanaan PKL menggunakan berbagai model evaluasi pendidikan untuk menilai efektivitas program dalam mendukung kesiapan kerja lulusan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek implementasi program, pengelolaan administrasi, atau evaluasi hasil pembelajaran siswa. Kajian yang secara khusus menganalisis tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan PKL masih relatif terbatas, terutama yang melihat bagaimana interaksi antaraktor, mekanisme koordinasi, serta

pembagian peran antara sekolah dan industri terbentuk dalam praktik. Selain itu, penelitian mengenai tata kelola kolaboratif PKL pada program keahlian agribisnis tanaman perkebunan juga masih jarang dilakukan, meskipun program keahlian ini memiliki karakteristik lingkungan kerja dan pola kemitraan yang berbeda dibandingkan dengan bidang keahlian lainnya. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan PKL dibangun dan dijalankan dalam konteks pendidikan vokasi.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian pendidikan vokasi, khususnya terkait analisis tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan PKL yang mengintegrasikan aspek desain kelembagaan, proses kolaborasi, serta dinamika interaksi antaraktor dalam konteks program keahlian yang spesifik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan PKL pada program keahlian agribisnis tanaman perkebunan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan di SMK Negeri 1 Hanau. Fokus penelitian mencakup desain kelembagaan, mekanisme koordinasi dan komunikasi antara sekolah dan industri, dinamika interaksi antaraktor, serta implikasi tata kelola kolaboratif terhadap mutu layanan PKL sebagai bagian dari pendidikan vokasi.

Penelitian ini difokuskan pada empat rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana desain tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan PKL di SMK Negeri 1 Hanau; (2) bagaimana proses kolaborasi yang meliputi dialog, kepercayaan, komitmen, dan kepemimpinan fasilitatif berlangsung; (3) faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas tata kelola kolaboratif; serta (4) bagaimana dampak tata kelola kolaboratif terhadap mutu layanan PKL sebagai outcome pendidikan vokasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan vokasi dengan menganalisis penyelenggaraan PKL melalui perspektif tata kelola kolaboratif yang menekankan pentingnya interaksi antaraktor dalam membangun kemitraan antara sekolah dan industri. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *collaborative governance* untuk memahami secara komprehensif bagaimana desain kelembagaan, proses kolaborasi, serta dinamika interaksi antaraktor memengaruhi efektivitas penyelenggaraan PKL. Penelitian ini juga menyoroti peran kapasitas individu siswa sebagai bagian integral dalam mendukung keberhasilan pembelajaran berbasis kerja dalam pendidikan vokasi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris melalui kajian pada program keahlian agribisnis tanaman perkebunan, yang hingga saat ini masih relatif jarang dibahas dalam literatur pendidikan vokasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan model kemitraan yang lebih efektif antara sekolah vokasi dan dunia industri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis kerja.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Program Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan di SMK Negeri 1 Hanau. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami proses, interaksi, dan pengalaman antaraktor secara mendalam, bukan untuk mengukur variabel secara statistik (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik dalam konteks nyata, yaitu pelaksanaan PKL di SMK Negeri 1 Hanau yang memiliki kemitraan industri yang aktif dan berkelanjutan. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara komprehensif dalam lingkungan alaminya, termasuk dinamika kolaborasi antara sekolah dan industri (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan pada 2 Januari hingga 28 Februari 2026 di SMK Negeri 1 Hanau. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan

informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan peran, pengalaman, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan PKL. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dari individu yang benar-benar memahami fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019; Moleong, 2018). Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan 20 informan yang berasal dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan PKL, yaitu unsur manajemen sekolah, guru pembimbing, pihak industri mitra, serta siswa yang telah mengikuti PKL. Siswa dilibatkan sebagai informan karena mereka merupakan pihak yang mengalami secara langsung proses pembelajaran di lingkungan kerja selama program PKL berlangsung. Pemilihan siswa dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif dalam kegiatan PKL, lokasi penempatan di perusahaan mitra, serta kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam proses wawancara.

Rincian informasi penelitian disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Sekolah	1 orang	Pimpinan sekolah yang berperan dalam kebijakan dan pengelolaan PKL
2	Ketua Program Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan	1 orang	Penanggung jawab koordinasi program keahlian dan PKL
3	Guru Pembimbing PKL	3 orang	Guru yang membimbing dan memonitor siswa selama PKL
4	HRD / kepala Personalia Industri	3 orang	Perwakilan industri dari PT. Tapian Nadanggan, PT. Wanasawit Subur Lestari 1 dan PT. Wanasawit Subur Lestari 2
5	Siswa yang telah melaksanakan PKL	12 orang	Masing-masing 4 orang dari 3 perusahaan mitra
<b>Total Informan</b>		<b>20 orang</b>	

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan terbatas, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan yang memuat beberapa tema utama, yaitu: (1) perencanaan kerja sama antara sekolah dan industri, (2) peran dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam pelaksanaan PKL, (3) bentuk komunikasi dan koordinasi antara sekolah dan industri, (4) pengalaman siswa selama mengikuti PKL, serta (5) evaluasi dan tantangan dalam pelaksanaan program PKL.

Observasi dilakukan secara partisipan terbatas, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sebagai guru sekaligus pembimbing PKL di sekolah, namun tetap menjaga posisi sebagai peneliti dengan membatasi keterlibatan pada aspek pengamatan terhadap proses pelaksanaan PKL dan interaksi antaraktor. Posisi ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks penelitian karena memiliki akses langsung terhadap situasi yang diamati, namun tetap diupayakan pengendalian subjektivitas melalui refleksi diri dan triangulasi data. Pendekatan observasi partisipan dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif pelaku secara lebih kontekstual dan mendalam (Creswell & Poth, 2018; Flick, 2018).

Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data dari wawancara dan observasi, seperti dokumen kerja sama sekolah dengan industri, laporan kegiatan PKL, serta dokumen monitoring dan evaluasi program. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi sumber dan metode (Flick, 2018).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik yang dilakukan secara bertahap selama proses penelitian dengan mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan merangkum data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan memfokuskan pada informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses pengkodean tematik dengan menandai bagian-bagian informasi yang dianggap penting, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa tema sesuai dengan fokus penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan matriks tematik untuk membantu peneliti memahami pola-pola yang muncul dari data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dengan meninjau kembali kesesuaian antara temuan di lapangan dan interpretasi peneliti.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, yaitu kepala sekolah, kepala program keahlian, pihak industri, guru pembimbing dan siswa peserta PKL. Melalui perbandingan tersebut, peneliti dapat melihat kesesuaian maupun perbedaan pandangan antarinforman mengenai pelaksanaan PKL. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan program PKL di sekolah. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking*, yaitu teknik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengonfirmasi kembali data atau interpretasi peneliti kepada informan. Dalam penelitian ini, *member checking* dilakukan secara terbatas dengan meminta beberapa informan untuk meninjau kembali informasi penting yang telah disampaikan, sehingga interpretasi peneliti tetap sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka. Peneliti juga melakukan refleksi selama proses penelitian untuk meminimalkan potensi bias dalam analisis data. Seluruh langkah tersebut dilakukan dengan mengacu pada prinsip *trustworthiness* yang mencakup kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985).

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, termasuk persetujuan partisipan dan perlindungan identitas informan. Seluruh data dikumpulkan dengan persetujuan kepala sekolah dan para partisipan penelitian, serta digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan PKL, khususnya dalam kemitraan antara sekolah dan industri pada Program Keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan di SMK Negeri 1 Hanau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Desain Tata Kelola Kolaboratif dalam Penyelenggaraan PKL

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada program keahlian Agribisnis Tanaman Perkebunan di SMKN 1 Hanau dilaksanakan melalui desain tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, yaitu kepala sekolah, kepala program keahlian, guru pembimbing, pihak industri, serta siswa. Kolaborasi ini tercermin dalam proses perencanaan program, penentuan lokasi PKL, serta pembagian peran antara sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan industri sebagai penyedia lingkungan kerja bagi siswa untuk memperoleh pengalaman praktik secara langsung.

Kepala sekolah menjelaskan bahwa PKL merupakan bagian penting dari pembelajaran karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami dunia kerja secara nyata.

*“Di sekolah kami, PKL merupakan bagian penting dari pembelajaran. Jadi semua siswa memang diwajibkan mengikuti PKL agar mereka bisa mendapatkan pengalaman kerja langsung di dunia industri.”*

(Kepala Sekolah, wawancara, 9 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKL dipandang sebagai bagian integral dari proses pembelajaran di sekolah vokasi. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di sekolah ke dalam praktik kerja nyata di industri. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, kerja sama antara sekolah dan industri menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program PKL.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Program Keahlian Agribisnis Tanaman dan Perkebunan yang menegaskan bahwa koordinasi antara sekolah dan industri tidak hanya dilakukan pada tahap awal, tetapi berlangsung secara berkelanjutan selama pelaksanaan PKL.

*“koordinasi dengan pihak industri tidak hanya dilakukan pada awal penempatan, tetapi juga selama pelaksanaan PKL melalui komunikasi rutin untuk memastikan kesesuaian kompetensi siswa dengan kebutuhan industri”*

(Ketua Program Keahlian, wawancara, 9 Februari 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa PKL tidak hanya dipahami sebagai kegiatan praktik kerja semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembelajaran berbasis kerja dalam pendidikan vokasi. Desain tata kelola yang melibatkan kolaborasi antara sekolah dan industri mencerminkan prinsip *collaborative governance*, yaitu pengelolaan program publik melalui kerja sama antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan bersama (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks pendidikan vokasi, kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan dunia kerja.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan perkembangan konsep *work-integrated learning* (WIL) dalam pendidikan vokasi yang menekankan integrasi antara pembelajaran akademik dengan pengalaman kerja di industri. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan WIL mampu meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja karena siswa memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan yang dipelajari di sekolah dalam konteks kerja yang nyata (Billett, 2020; Jackson, 2021). Hal ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang menyatakan bahwa sebagian besar tugas yang diberikan selama PKL masih berkaitan dengan pelajaran di sekolah, sehingga membantu dalam memahami penerapan ilmu secara nyata.

*“Sebagian besar tugas yang diberikan selama PKL masih berkaitan dengan pelajaran di sekolah, seperti kegiatan di bidang budidaya tanaman perkebunan. Dari situ saya bisa memahami bagaimana penerapan ilmu yang dipelajari di sekolah.”*

(Siswa PKL, wawancara, 11 Februari 2026).

Dengan demikian, desain tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan PKL di SMKN 1 Hanau menunjukkan adanya upaya integrasi antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri melalui kemitraan yang terstruktur, meskipun dalam praktiknya masih membutuhkan penguatan pada aspek standardisasi dan keberlanjutan program.

Desain tata kelola tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk interaksi dan koordinasi antaraktor selama pelaksanaan PKL yang tercermin dalam proses kolaborasi antara sekolah dan industri.

### **Proses Kolaborasi antara Sekolah dan Industri**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data wawancara, proses kolaborasi antara sekolah dan industri dalam pelaksanaan PKL berlangsung melalui berbagai bentuk koordinasi dan komunikasi yang dilakukan sebelum maupun selama kegiatan PKL berlangsung. Kolaborasi tersebut melibatkan

guru pembimbing dari pihak sekolah serta pembimbing lapangan dari pihak industri yang berperan dalam mendampingi siswa selama menjalani kegiatan praktik kerja.

Pelaksanaan PKL tidak hanya ditentukan oleh adanya kerja sama formal antara sekolah dan industri, tetapi juga oleh proses interaksi yang berlangsung antara berbagai aktor yang terlibat. Koordinasi antara sekolah dan industri dilakukan melalui komunikasi yang berkelanjutan, baik sebelum maupun selama kegiatan PKL berlangsung. Guru pembimbing dari sekolah memiliki peran penting dalam memantau perkembangan siswa serta menjalin komunikasi dengan pembimbing dari pihak industri.

*“Selama PKL berlangsung, kami tetap menjalin komunikasi dengan pembimbing dari pihak industri untuk mengetahui perkembangan siswa.”*  
(Guru Pembimbing, wawancara, 9 Februari 2026).

Monitoring yang dilakukan oleh guru pembimbing selama pelaksanaan PKL menunjukkan adanya upaya menjaga kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan pengalaman kerja di industri. Dalam konteks collaborative governance, mekanisme monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015). Selain itu, dalam pendekatan work-integrated learning, monitoring berperan sebagai sarana refleksi dan umpan balik bagi siswa untuk mengoptimalkan pengalaman belajar selama berada di lingkungan kerja (Billett, 2018). Dengan demikian, monitoring tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi berkelanjutan dalam memastikan kesesuaian antara proses pembelajaran di industri dengan tujuan pendidikan vokasi.

Di sisi lain, pihak industri memberikan pembimbing lapangan yang bertugas memberikan arahan kepada siswa serta membantu mereka memahami proses kerja yang ada di perusahaan.

*“Siswa biasanya ditempatkan pada unit kerja perkebunan dan diberikan tugas secara bertahap sesuai kemampuan dengan pendampingan pembimbing lapangan.”*  
(Perwakilan Industri, wawancara, 7 Februari 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PKL dipengaruhi oleh adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara sekolah dan pihak industri. Interaksi antara guru pembimbing dan pembimbing lapangan memungkinkan siswa memperoleh arahan yang jelas dalam melaksanakan tugas selama kegiatan PKL. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Smith dan Yasukawa (2019) yang menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara institusi pendidikan dan mitra industri dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran berbasis kerja. Selain itu, penelitian Jackson (2021) juga menegaskan bahwa kualitas kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia industri merupakan faktor penting dalam keberhasilan program *work-integrated learning*.

Peran aktif industri dalam memberikan bimbingan langsung kepada siswa menunjukkan bahwa pembelajaran di tempat kerja tidak hanya bersifat *observasional*, tetapi juga partisipatif. Dalam perspektif work-integrated learning, keterlibatan pembimbing industri merupakan faktor kunci dalam membentuk pengalaman belajar yang bermakna, karena siswa memperoleh arahan langsung dari praktisi yang memiliki pengalaman kerja nyata (Billett, 2011). Selain itu, kualitas interaksi antara siswa dan pembimbing industri juga berpengaruh terhadap pengembangan keterampilan profesional dan kesiapan kerja siswa (Jackson, 2019).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pembelajaran berbasis kerja sangat dipengaruhi oleh kualitas kemitraan antara lembaga pendidikan dan industri. Kolaborasi yang efektif antara kedua pihak dapat meningkatkan relevansi pembelajaran sekaligus membantu siswa memahami tuntutan dunia kerja secara lebih realistis (Jackson, 2021; Smith, 2020). Oleh karena itu, proses kolaborasi antara sekolah

dan industri dalam penyelenggaraan PKL tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan interaksi yang berkelanjutan dalam proses pembelajaran berbasis kerja.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, proses kolaborasi tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas penyelenggaraan PKL.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PKL**

Hasil analisis tematik terhadap data wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan PKL dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang muncul selama kegiatan berlangsung. Faktor pendukung terutama berkaitan dengan adanya kemitraan antara sekolah dan perusahaan perkebunan, dukungan fasilitas dari pihak industri, serta keberadaan pembimbing lapangan yang mendampingi siswa selama kegiatan PKL. Di sisi lain, beberapa faktor penghambat juga ditemukan, terutama terkait dengan kesiapan nonteknis siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja.

*“Perusahaan menyediakan pembimbing lapangan, fasilitas tempat menginap, listrik, serta uang saku bagi siswa selama kegiatan PKL berlangsung.”*  
(Perwakilan Industri, wawancara, 7 Februari 2026)

Namun demikian, dukungan dari perusahaan mitra tidak selalu sama. Dua perusahaan memberikan fasilitas uang saku bagi siswa PKL, sedangkan perusahaan lainnya hanya menyediakan fasilitas tempat tinggal dan pembimbing lapangan. Variasi kebijakan ini menunjukkan bahwa dukungan operasional dari industri masih bersifat kontekstual dan bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan PKL. Salah satu kendala yang muncul adalah keterbatasan inisiatif siswa dalam berkomunikasi serta kesiapan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja.

*“Secara umum, kompetensi siswa sudah cukup baik, tetapi sebagian siswa masih terlihat kurang aktif dalam berkomunikasi.”*  
(Perwakilan Industri, wawancara, 7 Februari 2026).

Hal serupa juga dirasakan oleh siswa yang mengikuti PKL, terutama pada tahap awal pelaksanaan kegiatan

*“Pada awalnya saya merasa agak canggung karena lingkungan kerja di industri berbeda dengan kegiatan belajar di sekolah.”*  
(Siswa PKL, wawancara, 11 Februari 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKL tidak hanya dipengaruhi oleh sistem kerja sama antara sekolah dan industri, tetapi juga oleh kesiapan individu siswa dalam menghadapi lingkungan kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuningsih et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran berbasis kerja pada pendidikan vokasi dipengaruhi oleh kesiapan siswa dalam beradaptasi dengan budaya kerja industri. Selain itu, penelitian Purnama dan Nugroho (2022) juga menegaskan bahwa pengembangan *soft skills* seperti kemampuan komunikasi, kedisiplinan, dan inisiatif belajar merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan praktik kerja lapangan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa kesiapan nonteknis siswa menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan PKL, terutama dalam aspek komunikasi, adaptasi, dan kedisiplinan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran berbasis

kerja tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh kemampuan employability skills seperti komunikasi, kerja sama tim, dan adaptasi terhadap lingkungan kerja (Jackson, 2019; Billett, 2018). Selain itu, tantangan dalam beradaptasi dengan budaya kerja industri merupakan fenomena umum dalam implementasi work-integrated learning, di mana siswa perlu menyesuaikan diri dengan norma, ritme kerja, dan ekspektasi profesional di tempat kerja (Smith, 2012; Raelin, 2008).

### **Dampak Tata Kelola Kolaboratif terhadap Mutu Layanan PKL**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data wawancara dengan berbagai informan, pelaksanaan PKL memberikan dampak terhadap peningkatan mutu layanan pembelajaran berbasis kerja di sekolah vokasi. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh siswa sebagai peserta PKL, tetapi juga oleh pihak sekolah dan industri sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran berbasis kerja.

Tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan PKL memberikan dampak terhadap mutu layanan pembelajaran berbasis kerja di pendidikan vokasi. Dari perspektif siswa, kegiatan PKL memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja nyata sekaligus meningkatkan keterampilan teknis maupun keterampilan nonteknis seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama.

*“PKL sangat membantu kami memahami bagaimana dunia kerja sebenarnya serta melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja.”*  
(Siswa PKL, wawancara, 11 Februari 2026).

Dari perspektif industri, program PKL juga memberikan manfaat dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan serta memperkuat hubungan kemitraan antara industri dan lembaga pendidikan.

*“PKL membantu kegiatan operasional perusahaan sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dengan sekolah.”*  
(Perwakilan Industri, wawancara, 7 februari 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif antara sekolah dan industri tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa sebagai peserta didik, tetapi juga bagi institusi pendidikan dan dunia industri. Kolaborasi tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan industri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sa'idah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa praktik kerja lapangan mampu meningkatkan pengalaman kerja siswa serta membantu mereka memahami tuntutan dunia kerja secara lebih realistis. Penelitian Artha et al. (2023) juga menyatakan bahwa praktik kerja industri merupakan komponen penting dalam pendidikan vokasi karena dapat meningkatkan kompetensi profesional dan kesiapan kerja peserta didik.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kemitraan formal antara sekolah dan industri, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kolaboratif yang terbangun di antara para aktor yang terlibat. Tata kelola tersebut mencakup kejelasan desain kelembagaan, intensitas komunikasi dan koordinasi, serta komitmen bersama dalam mendukung proses pembelajaran berbasis kerja. Selain itu, kapasitas individu siswa, khususnya dalam aspek komunikasi, inisiatif, dan kemampuan adaptasi terhadap budaya kerja industri, juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan program. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan PKL perlu dipahami

sebagai suatu sistem yang integratif, yang menghubungkan dimensi kelembagaan, proses kolaboratif, dan kapasitas individu dalam menghasilkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada pendidikan vokasi berjalan melalui mekanisme tata kelola kolaboratif yang melibatkan sekolah, industri, dan siswa sebagai aktor utama. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga merupakan sistem yang mengintegrasikan desain kelembagaan, proses interaksi, dan kapasitas individu untuk mendukung mutu layanan pendidikan vokasi.

Dari sisi desain tata kelola, PKL didukung oleh adanya MoU, pembagian peran yang jelas antara sekolah dan industri, serta pembekalan siswa sebelum pelaksanaan. Sekolah bertanggung jawab atas persiapan, bimbingan, dan monitoring siswa, sementara industri menyediakan fasilitas praktik, pembimbing lapangan, penugasan sesuai kompetensi, dan penilaian kinerja siswa. Kejelasan peran ini menjadi kunci agar setiap pihak memahami tanggung jawabnya dan pelaksanaan PKL berjalan terarah.

Dari sisi proses, kolaborasi ditandai oleh komunikasi yang berkelanjutan, kepercayaan, dan komitmen bersama antara sekolah dan industri. Keberhasilan program juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan siswa pada level individu, terutama dalam aspek komunikasi, inisiatif, disiplin, dan kemampuan adaptasi terhadap budaya kerja industri. Kolaborasi yang efektif pada tingkat kelembagaan dan interpersonal ini menghasilkan pengalaman belajar yang relevan, meningkatkan kompetensi teknis, membentuk karakter profesional, serta mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain cakupan yang terbatas pada satu sekolah dan tiga industri mitra, serta fokus pada persepsi informan tanpa pengukuran kuantitatif formal. Oleh karena itu, generalisasi hasil harus dilakukan dengan hati-hati, dan penelitian lanjutan disarankan dengan cakupan lebih luas serta metode yang lebih beragam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa mutu layanan PKL tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan industri, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, proses kolaboratif, dan kapasitas individu. Pendekatan ini dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan pendidikan vokasi yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian pendidikan vokasi, khususnya dengan memperkuat perspektif *collaborative governance* dalam konteks pembelajaran berbasis kerja (*work-integrated learning*). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya dipahami sebagai desain kelembagaan atau bentuk kemitraan formal, tetapi juga sebagai sistem yang mengintegrasikan dimensi kelembagaan, proses interaksi, dan kapasitas individu dalam pelaksanaan PKL.

Temuan ini sekaligus memperluas kajian sebelumnya yang cenderung memisahkan antara aspek kemitraan kelembagaan dan pengalaman belajar individu, dengan menunjukkan bahwa efektivitas PKL justru ditentukan oleh keterkaitan antara kedua aspek tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya perspektif teoretis tentang pembelajaran berbasis kerja dengan menegaskan bahwa keberhasilan *work-integrated learning* dalam pendidikan vokasi perlu dipahami melalui pendekatan tata kelola kolaboratif yang bersifat holistik dan kontekstual.

## Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik dari aspek metodologis maupun teoritis. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada satu lokasi penelitian, yaitu SMK Negeri 1 Hanau dengan tiga perusahaan mitra.

Kondisi ini menyebabkan temuan penelitian bersifat kontekstual sehingga tidak dapat digeneralisasi secara luas pada seluruh program pendidikan vokasi. Selain itu, data penelitian didasarkan pada persepsi informan melalui wawancara dan observasi terbatas, sehingga belum dilengkapi dengan pengukuran kuantitatif yang dapat memperkuat validitas temuan secara statistik.

Dari sisi teoritis, penelitian ini mengkaji tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan PKL dengan mengintegrasikan perspektif *collaborative governance* dan *work-integrated learning*, namun belum secara mendalam menguji hubungan antarvariabel secara kuantitatif maupun membandingkan dengan model tata kelola lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokasi dan subjek penelitian, menggunakan pendekatan *mixed methods*, serta mengembangkan model pengukuran yang lebih komprehensif untuk menguji efektivitas tata kelola kolaboratif dalam berbagai konteks pendidikan vokasi.

### Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dan teoritis dalam pengembangan pendidikan vokasi, khususnya dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PKL sangat dipengaruhi oleh kejelasan pembagian peran antara sekolah dan industri, intensitas komunikasi selama pelaksanaan, serta komitmen kolaboratif antaraktor. Oleh karena itu, pengelola pendidikan vokasi perlu memperkuat desain kemitraan melalui penyusunan standar operasional kerja sama yang lebih terstruktur, khususnya terkait mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi bersama antara sekolah dan industri. Selain itu, variasi dukungan dari pihak industri, seperti perbedaan fasilitas dan pembimbingan di masing-masing perusahaan mitra, menunjukkan perlunya standardisasi minimum dukungan industri agar pengalaman belajar siswa lebih merata dan optimal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan PKL tidak hanya terletak pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada kesiapan individu siswa, terutama dalam hal komunikasi, inisiatif, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja industri. Oleh karena itu, sekolah perlu memperkuat program pembekalan pra-PKL yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga secara khusus dirancang untuk mengembangkan *soft skills* tersebut melalui simulasi kerja, pembelajaran berbasis proyek, maupun pelatihan komunikasi dan etika kerja.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran berbasis kerja dalam pendidikan vokasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui aspek kemitraan formal atau desain kelembagaan semata, tetapi perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara desain tata kelola, proses kolaboratif, dan kapasitas individu siswa. Temuan ini memperkuat perspektif *collaborative governance* dengan menempatkan dimensi individu sebagai bagian integral dalam sistem tata kelola kolaboratif, sekaligus memperluas kajian *work-integrated learning* yang selama ini lebih banyak menekankan pada pengalaman belajar di tempat kerja tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan dinamika tata kelola antaraktor.

Dengan demikian, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan model konseptual tata kelola kolaboratif PKL yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan dimensi kelembagaan, proses interaksi, dan kesiapan individu sebagai satu kesatuan dalam mendukung mutu pembelajaran berbasis kerja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aprianto. (2025). Manajemen kemitraan industri dalam praktik kerja lapangan pada pendidikan vokasi. *Jurnal Pendidikan Vokasi Indonesia*, 15(1), 45–58.
- Artha, I. W., Putra, I. K., & Santosa, G. (2023). Peran praktik kerja industri dalam meningkatkan kompetensi siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 13(2), 210–222.

- Billett, S. (2011). *Vocational education: Purposes, traditions and prospects*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-1954-5>
- Billett, S. (2018). Learning through work: Workplace affordances and individual engagement. In S. Billett (Ed.), *Learning through practice* (pp. 1–20). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-1954-5>
- Billett, S. (2020). *Integrating practice-based experiences into higher education*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-34847-2>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Guile, D., & Young, M. (2003). Transfer and transition in vocational education: Some theoretical considerations. *Journal of Vocational Education & Training*, 55(4), 471–498. <https://doi.org/10.1080/13636820300200240>
- Jackson, D. (2019). Employability skill development in work-integrated learning. *Studies in Higher Education*, 44(10), 1758–1770. <https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1458229>
- Jackson, D. (2021). The contribution of work-integrated learning to graduate employability. *Higher Education Research & Development*, 40(2), 395–410. <https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1737546>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Vocational education and training in Indonesia: Strengthening system governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/02d3c6b4-en>
- Purnama, A., & Nugroho, R. (2022). Pengaruh soft skills terhadap kesiapan kerja siswa SMK. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 12(1), 85–96.
- Raelin, J. A. (2008). *Work-based learning: Bridging knowledge and action in the workplace*. Jossey-Bass.
- Sa'idah, N., Hidayat, T., & Kusuma, R. (2023). Dampak praktik kerja lapangan terhadap kesiapan kerja siswa SMK. *Jurnal Pendidikan dan Dunia Kerja*, 5(2), 134–145.
- Smith, E. (2012). *Work-integrated learning in higher education*. Higher Education Research & Development Society of Australasia.
- Smith, E. (2020). Partnerships between vocational education and training providers and industry. *Journal of Vocational Education & Training*, 72(3), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13636820.2019.1698642>
- Smith, E., & Yasukawa, K. (2019). The role of partnerships in vocational education and training. *Journal of Vocational Education & Training*, 71(2), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13636820.2018.1559186>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Suhartanta, S., Rahmawati, D., & Prasetyo, H. (2024). Evaluasi program magang dalam pendidikan vokasi. *Jurnal Pendidikan Vokasi Indonesia*, 14(1), 25–40.
- Wahyuningsih, S., Fitriani, L., & Nugraha, A. (2023). Kesiapan kerja siswa dalam pembelajaran berbasis industri. *Jurnal Pendidikan Kejuruan*, 13(1), 55–67.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.